



Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah

(Studi Kasus Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024)

Rendra Syah Putra¹, Reni Apriani³, Ainur Ropik²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹⁻³

Email Korespondensi: rendrasptr2003@gmail.com, ainurropik_uin@radenfatah.ac.id, reniapriani_uin@radenfatah.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of money politics practices on people's voting awareness and the factors behind it in the 2024 regional head elections in Prabumulih II Village, Muara Lakitan District, Musi Rawas Regency. Using a qualitative approach and analytical descriptive methods, this study seeks to understand the patterns of people's political behavior through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The research results show that public awareness of voting is influenced by three main dimensions. From a sociological perspective, vote buying is considered commonplace and part of political culture, leading citizens to be permissive. From a psychological perspective, there is limited opposition based on morals and religion, but its influence is relatively small compared to economic and social factors. Meanwhile, from a rational perspective, most citizens accept vote buying due to economic necessity, although some also assess the candidate's vision, mission, and track record. The main factors strengthening the impact of money politics are related to weak economic conditions, low political knowledge, and a pragmatic culture. These findings confirm that money politics not only undermines the quality of local democracy but also erodes public political awareness in exercising their right to vote critically.

Keywords: Money Politics, Voting Awareness, Regional Head Elections

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh praktik politik uang terhadap kesadaran memilih masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada pemilihan kepala daerah di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini berupaya memahami pola perilaku politik masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran memilih masyarakat dipengaruhi tiga dimensi utama. Dari aspek sosiologis, politik uang dianggap hal yang lumrah dan bagian dari budaya politik, sehingga warga cenderung permisif. Dari aspek psikologis, terdapat penolakan terbatas berdasarkan moral dan agama, namun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan pada aspek rasional, sebagian besar warga menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi, meskipun ada pula yang menilai visi, misi, serta rekam jejak calon. Faktor utama yang memperkuat dampak politik uang berkaitan dengan lemahnya kondisi ekonomi, rendahnya pengetahuan politik, dan budaya pragmatis. Temuan ini menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi lokal, tetapi juga mengikis kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara kritis.

Kata Kunci: Politik Uang, Kesadaran Memilih, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya dirancang sebagai sarana demokratis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan. Namun, dalam praktiknya, kualitas demokrasi lokal seringkali terganggu oleh fenomena politik uang yang masih mengakar kuat di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan atau tingkat nasional, tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan yang kondisi sosial-ekonominya relatif rentan terhadap praktik transaksional. Politik uang kemudian menjadi persoalan serius karena tidak hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

Fenomena toleransi masyarakat terhadap politik uang terlihat jelas dari survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada Pemilu 2024. Dari 2.975 responden yang diwawancarai di 3.000 TPS, sekitar 46,9% menyatakan bahwa politik uang dianggap sebagai hal wajar, sementara 49,6% menolak praktik tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa hampir separuh masyarakat Indonesia masih menganggap politik uang sebagai praktik yang dapat diterima dalam kontestasi elektoral, sehingga membuka ruang lebar bagi calon kepala daerah untuk menggunakan strategi transaksional.

Selain survei nasional, lembaga pengawas pemilu juga mendapati banyak indikasi pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengidentifikasi sedikitnya 130 dugaan kasus politik uang selama masa tenang hingga hari pemungutan suara pada Pilkada 2024. Meskipun beberapa di antaranya berhasil ditangani, sebagian besar kasus sulit dibuktikan karena dilakukan secara terselubung. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan di lapangan, sekaligus memperkuat persepsi bahwa politik uang sulit diberantas.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. Sejumlah media lokal melaporkan keterlibatan perangkat desa maupun tim sukses dalam praktik politik uang. Salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian terjadi pada 26 November 2024, ketika seorang ketua RT tertangkap tangan membawa uang sekitar Rp3 juta beserta lembaran data pemilih yang mengarah pada pasangan calon tertentu. Kejadian ini dilaporkan oleh portal berita linggauklik.com dan memperlihatkan keterlibatan aktor lokal dalam memperkuat jaringan distribusi politik uang. Dikonfirmasi dari media lain juga dilaporkan oleh rmlsumsel.id pada 25 November 2024, di mana seorang oknum RT tersebut ketahuan hendak membagikan uang kepada warga sebelum akhirnya diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada Panwascam. Tidak berhenti di situ, pada 29 September 2024, Koran Linggau Pos juga menuliskan laporan dari tim advokasi salah satu pasangan calon yang menuding adanya praktik pembagian uang di Kecamatan Muara Lakitan. Rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang di Musi Rawas tidak hanya isu wacana, melainkan kenyataan yang terbukti di lapangan.

Secara khusus, Desa Prabumulih II di Kecamatan Muara Lakitan juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa politik uang masih hadir pada Pilkada 2024, baik dalam bentuk pemberian uang tunai antara Rp100.000 hingga Rp200.000, maupun distribusi barang kebutuhan

pokok. Dari 1.085 pemilih terdaftar, sebanyak 832 orang (76,68%) menggunakan hak pilihnya, sementara 253 orang lainnya memilih untuk tidak berpartisipasi. Tingkat partisipasi ini memperlihatkan adanya sekitar seperempat pemilih yang enggan hadir, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ketidakpercayaan terhadap proses politik yang dianggap telah tercemar praktik transaksional.

Padahal, secara hukum praktik ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 278 ayat (2), yang melarang pemberian atau penerimaan imbalan materi dengan tujuan memengaruhi pilihan politik. Namun realitas sosial di pedesaan dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah dan literasi politik yang rendah membuat politik uang terus berlangsung dan bahkan dianggap sebagai hal lumrah. Situasi ini menggambarkan bagaimana kebutuhan ekonomi yang mendesak serta minimnya pendidikan politik dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih manfaat instan dibandingkan rasionalitas politik jangka panjang.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dampak politik uang terhadap kesadaran memilih masyarakat di Desa Prabumulih II. Kajian ini penting karena penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti politik uang pada konteks perkotaan atau level nasional, sementara kajian spesifik di tingkat desa masih terbatas. Dengan menggunakan kerangka teori perilaku pemilih dari Ramlan Surbakti yang meliputi dimensi sosiologis, psikologis, dan rasional penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya diskusi mengenai perilaku pemilih di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas untuk memperkuat pendidikan politik dan mencegah praktik politik uang di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk menggambarkan dan mengeksplorasi kondisi sosial secara menyeluruh mencakup berbagai aspek yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis maupun lisan dari individu yang diamati, serta berupaya memahami makna yang terkandung dalam suatu peristiwa sesuai dengan konteksnya (Moleong, 2021). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan di Desa Prabumulih II yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik politik uang, seperti kepala desa, ketua KPPS, tokoh agama, tim sukses, dan masyarakat dari berbagai latar sosial. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip relevan, seperti daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat, catatan administrasi desa, serta pemberitaan media lokal terkait dugaan praktik politik uang pada Pilkada Musi Rawas 2024, yang berfungsi melengkapi temuan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan untuk mencatat

dinamika politik dan perilaku masyarakat, serta dokumentasi yang bersumber dari arsip desa dan pemberitaan media. Penelitian dilaksanakan di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah informasi relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan secara sistematis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan melalui identifikasi pola serta hubungan antar-temuan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat

Jika dianalisis menggunakan teori perilaku pemilih yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, maka fenomena ini dapat dipahami melalui sejumlah indikator yang mencerminkan bagaimana dampak politik uang dalam membentuk kesadaran memilih masyarakat dalam Pilkada di Desa Prabumulih II.

Pertama aspek sosiologis, memainkan peran penting dalam dinamika politik karena masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat dengan kelompok sosial maupun tokoh lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak semata-mata berlangsung sebagai transaksi individual, tetapi juga beroperasi dalam lingkup jaringan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial turut berkontribusi dalam memperkuat citra politik pasangan calon, yang kerap memanfaatkan kelompok masyarakat tertentu sebagai basis untuk membangun kepercayaan dan legitimasi. Dengan demikian, politik uang tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan langsung antara kandidat dan pemilih, melainkan sebagai fenomena yang menyatu dengan struktur sosial desa. Solidaritas komunitas, kedekatan kelompok, dan peran tokoh lokal menjadi faktor yang memperbesar efektivitas politik uang dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Dalam aspek sosiologis, politik uang di Desa Prabumulih II menunjukkan adanya dampak yang berlapis, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat. Dari sisi yang dianggap positif, sebagian warga menilai praktik ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun di sisi lain, politik uang membawa dampak negatif yang cukup serius terhadap demokrasi dan kehidupan sosial. Praktik ini menurunkan kualitas demokrasi karena pilihan masyarakat tidak lagi berlandaskan pada penilaian rasional terhadap visi, misi, atau rekam jejak kandidat, melainkan semata-mata pada pemberian materi. Pemilu kemudian lebih menyerupai transaksi ekonomi daripada mekanisme pertanggungjawaban politik. Selain itu, politik uang melemahkan mentalitas masyarakat.

Menurut teori perilaku pemilih yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, politik uang tidak semata-mata dipahami sebagai praktik pemberian materi yang memberikan keuntungan sesaat bagi masyarakat, melainkan juga dapat dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial yang mempererat hubungan antara kandidat dan pemilih. Dalam konteks ini, keputusan masyarakat untuk memilih sering kali lebih dipengaruhi oleh relasi sosial yang telah terbentuk dalam komunitas. Pemilih

cenderung merasa memiliki ikatan emosional dengan calon yang dikenal dekat dan yang menunjukkan perhatian secara langsung kepada mereka. Walaupun terdapat kesadaran bahwa pilihan seharusnya didasarkan pada penilaian program dan kualifikasi kandidat, pada praktiknya norma dan solidaritas sosial yang berlaku lebih dominan dalam menentukan arah pilihan politik.

Kedua aspek psikologis, pendekatan psikologis dalam perilaku memilih menitikberatkan pada aspek emosional dan identifikasi diri pemilih terhadap partai politik maupun kandidat tertentu. Dalam keputusan memilih tidak selalu didasarkan pada analisis program atau rasionalitas, melainkan pada rasa kedekatan, pengalaman politik sebelumnya yang menimbulkan kepuasan, atau kesetiaan yang sudah terbangun terhadap sosok tertentu. Identifikasi semacam ini bersifat subyektif, namun menjadi faktor penting dalam menentukan arah pilihan masyarakat.

Secara umum, perilaku memilih masyarakat di Desa Prabumulih II tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertimbangan rasional seperti program kerja atau janji politik dari calon. Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor emosional, termasuk rasa kedekatan pribadi, kesetiaan terhadap calon yang mereka percayai, serta dorongan moral yang bersumber dari pengalaman sosial dan nilai-nilai yang dianut. Meski demikian, aspek moral dan integritas pribadi pemilih cenderung memiliki pengaruh yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan faktor ekonomi dan sosial yang lebih dominan.

Ketiga aspek rasional, pendekatan rasional dalam perilaku memilih memandang pemilih sebagai individu yang menentukan pilihan politik dengan mempertimbangkan aspek untung-rugi secara logis dan praktis. Seorang pemilih dianggap bertindak rasional ketika menilai calon atau partai berdasarkan sejauh mana mereka dapat memperoleh keuntungan tertentu, baik melalui kebijakan yang memberi manfaat, bantuan langsung, maupun program yang sesuai dengan kebutuhan pribadi ataupun kelompoknya. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, perilaku memilih yang rasional tampak ketika masyarakat menjatuhkan pilihan kepada calon yang diyakini mampu memberikan manfaat konkret dan langsung bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Hasil wawancara di Desa Prabumulih II memperlihatkan bahwa politik uang memiliki peran yang sangat dominan dalam perilaku memilih masyarakat dan sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka. Sebagian besar pemilih yang menerima politik uang terdorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, meskipun keputusan tersebut tetap dilandasi oleh pertimbangan rasional yang menekankan manfaat praktis dari bantuan yang diberikan calon. Namun demikian, terdapat pula sejumlah pemilih yang menolak praktik tersebut. Mereka lebih memilih menentukan sikap politik berdasarkan program kerja yang jelas serta visi pembangunan jangka panjang, dengan alasan bahwa keberlanjutan dan kemajuan desa dianggap lebih penting daripada bantuan materi yang hanya bersifat sementara. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka teori perilaku pemilih rasional, mayoritas masyarakat masih cenderung memilih dengan pertimbangan keuntungan jangka pendek melalui penerimaan politik uang. Akan tetapi, terdapat pula sebagian kecil pemilih yang tetap

menekankan rasionalitas politik dengan mempertimbangkan visi, program, dan prospek pembangunan jangka panjang yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Politik Uang

Faktor-faktor yang memengaruhi kuatnya praktik politik uang dalam perilaku memilih masyarakat di Desa Prabumulih II tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kondisi ekonomi yang rentan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kesadaran akan budaya politik saling berhubungan dan bersama-sama membentuk pola yang membuat masyarakat cenderung menerima praktik politik transaksional tersebut.

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Prabumulih II menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penerimaan terhadap praktik politik uang. Mayoritas warga masih bergantung pada pekerjaan harian dengan penghasilan yang relatif terbatas, sehingga setiap bantuan berupa uang tunai ataupun sembako dari kandidat dipandang sebagai cara cepat untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Data yang tersedia menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Desa Prabumulih II sebagian besar masih ditopang oleh kelompok dengan penghasilan tidak tetap. Dari total 325 responden, sebanyak 304 orang atau sekitar 93,6% bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan kecil, buruh, dan berbagai pekerjaan informal lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi yang rentan dan mudah dipengaruhi oleh perubahan eksternal. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tetap hanya berjumlah 21 orang atau sekitar 6,5%. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil, pamong desa, serta tenaga profesional dengan pendapatan yang lebih terjamin setiap bulan. Proporsi ini sangat kecil dibandingkan kelompok berpenghasilan tidak tetap, sehingga kontribusi mereka terhadap stabilitas ekonomi desa masih terbatas. Situasi semacam ini memiliki implikasi langsung terhadap perilaku politik masyarakat. Bagi banyak warga, pemberian uang atau barang dari calon dan tim sukses dianggap sebagai “rezeki tambahan” yang dapat langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan dalam menjelaskan mengapa praktik politik uang diterima secara luas. Dalam perspektif pendekatan rasional, keputusan menerima politik uang dipandang sebagai pilihan logis yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek, dibandingkan menunggu janji program pembangunan yang belum tentu terealisasi.

Tingkat pendidikan masyarakat turut menjadi faktor yang berperan penting dalam menentukan bagaimana praktik politik uang diterima dan memengaruhi perilaku memilih. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar warga masih menghadapi keterbatasan dalam menempuh pendidikan formal, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya akses pendidikan tersebut berimplikasi pada cara pandang dan pola pikir masyarakat ketika mengambil keputusan politik, termasuk dalam merespons tawaran politik uang. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Desa Prabumulih II masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada lemahnya kesadaran kritis dalam proses pemilihan. Dari total 482 penduduk, hanya 35 orang atau sekitar 7,2% yang berhasil menempuh pendidikan

tinggi, sementara sebagian besar masih berada pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Jumlah lulusan SD tercatat sebanyak 174 orang (36,1%), lulusan SMP 113 orang (23,4%), dan lulusan SMA 160 orang (33,1%). Dominasi kelompok dengan tingkat pendidikan rendah tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas literasi politik masyarakat belum merata di seluruh lapisan.

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya kesadaran politik warga. Terbatasnya akses pendidikan membuat masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang serta kurang kritis dalam mengevaluasi visi dan misi calon kepala daerah. Akibatnya, faktor rendahnya pendidikan menjadi salah satu alasan utama mengapa politik uang masih diterima secara luas di Desa Prabumulih II. Minimnya pemahaman politik juga menyebabkan praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat membuat kesadaran memilih lebih mudah diarahkan pada kepentingan jangka pendek dibandingkan pada pertimbangan rasional mengenai program dan kualitas calon.

Budaya politik yang berkembang di masyarakat Desa Prabumulih II turut menjadi salah satu alasan mengapa praktik politik uang masih diterima dengan mudah. Sebagian warga memandang pemberian uang atau sembako menjelang pemilu sebagai hal yang biasa dan bahkan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari satu periode pemilihan ke periode berikutnya. Dalam perspektif masyarakat, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai momentum memperoleh perhatian dalam bentuk bantuan materi. Rendahnya kesadaran politik ini tampak tidak hanya pada pemilihan kepala daerah, tetapi juga dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan lain di tingkat lokal.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa budaya politik masyarakat desa masih berada pada tahap parokial, yaitu ketika keterlibatan dalam politik dianggap tidak terlalu penting, dan partisipasi lebih sering dipahami sebatas formalitas. Bagi sebagian warga, hadir di TPS hanyalah rutinitas, tanpa disertai kesadaran penuh mengenai arti penting suara yang diberikan. Akibatnya, yang terbentuk bukan budaya politik partisipatif, melainkan budaya pasif yang minim pemaknaan terhadap proses demokrasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran memilih masyarakat Desa Prabumulih II pada Pilkada Musi Rawas 2024 sangat dipengaruhi oleh keberadaan politik uang. Dari sisi sosiologis, praktik ini sudah dianggap sebagai tradisi dan bagian dari budaya politik, sehingga masyarakat cenderung permisif terhadapnya. Dari aspek psikologis, meskipun ada sebagian kecil warga yang menolak dengan alasan moralitas dan agama, pengaruhnya tidak dominan dibandingkan faktor ekonomi dan sosial. Sementara itu, dari pendekatan rasional, mayoritas masyarakat menerima pemberian politik uang karena kebutuhan ekonomi, meskipun terdapat juga pemilih yang masih mempertimbangkan visi, misi, serta rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihan.

Adapun faktor yang memperkuat dampak politik uang di desa ini terutama terkait dengan kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya politik masyarakat. Secara ekonomi, mayoritas warga menggantungkan hidup pada pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap, sehingga pemberian uang atau barang dipandang sebagai bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi pendidikan, rendahnya literasi politik membuat masyarakat kurang kritis dalam memahami aturan pemilu maupun program calon, sehingga lebih mudah menerima politik uang. Sedangkan dari aspek budaya politik, praktik pemberian materi menjelang pemilu telah dianggap lumrah bahkan menjadi tradisi, yang pada akhirnya memperkuat politik transaksional sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, N. L., Rochmadian, S., Maliha, U., Sunan, U., Surabaya, A., & Abstrak, K. K. (2023). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Politik Identitas Dalam Pemilu Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia 1. Mei, 3(1).
- Al Arif, F. (2023). 19410213. *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Dan Keputusan Memilih Masyarakat Di Kota Malang*
- Al Ayyubi, S. (2024, February). *Survei Indikator Politik: Mayoritas Pemilih Toleran dengan Politik Uang*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240221/15/1742988/survei-indikator-politik-mayoritas-pemilih-toleran-dengan-politik-uang>
- Alamsyah, R. (2023). Skripsi_1906016045_Ridho_Alamsyah. *Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Legislatif 2019*
- Almond, G. A., & Sidney Verba. (1963). *he Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolGov UGM.
- Aulia Ramadhani, A., Azalia Meiadina, C., Nayla Olivia Sudrajat, C., Wisnu Wardhana, P., & Imroatus Solikah, Y. (2025). Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Maret*, 1(1), 76–85. <https://doi.org/10.59971/li>
- Azka, N. (2021). Nawal Azka, 170801074, FISIP, IP, 081347187195 (1). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus : Gampong Pulo Naleung)*
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhlurrahman Polsight, R. (2024). *Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas*. 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.44097>

- Hidayatullah, N. (2022). Novia hidayatullah 180603024_pdf. *Dampak Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pada Tahun 2019 Di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*
- Huda, N. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hutabalian, O. R., Stih, D., Mandiri, U., & Budiman, E. A. (2022). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum*.
- Ilhami Fawdi, M. (2024, November). *Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada*. Detiknews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>
- Marcelina, L., Ananda, A., & Nur Azizah Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, C. (2025). Pengaruh faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada DPRD terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. In *Journal of Education, Cultural and Politics* (Vol. 5, Issue 2).
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahyu, S., Rafni, A., & Nur Azizah Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, C. (2025). Praktek money politics dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. In *Journal of Education, Cultural and Politics* (Vol. 5, Issue 1).
- Saputri, T., & Marianata, A. (2024). *Analisis Fenomena Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu*. 02(1), 678-682. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Schaffer, F. C. (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying* (Lynne Rienner Publishers, Ed.).